

DFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.
- _____, *pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2002.
- Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana*, Raih Asa Skses, Depok, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2014
- _____, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Ctk. Pertama, Jakarta Timur, 2017
- _____, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Anonim, *Memahami Untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Erdianto Effendi, *hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Ermanshjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, ctk. Pertama, Jakarta, 2008.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, ctk. Kelima, Jakarta 2014.
- H. M. Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Luhut M. P. Pangaribuan, *Hukum Pidana Khusus Tentang Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi dan Kerjasama Internasional Serta Pengembalian Aset*, Pustaka Kemang, Jakarta 2016.
- Mahrus Ali, *Azas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- _____, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

_____, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011.

P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, CV. Sinar Baru, Bandung, 1984.

Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Penngantar*, PT. RajaGrafindo Persada, Ctk. Kelima, Jakarta, 2014.

Septa Candra, dkk, *Hukum Pidana Dalam Prespektif*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012.

B. Jurnal dan Makalah:

Firdaus, "Daluwarsa dalam Penuntutan Pidana Perspektif hukum Pidana Islam", *Al-jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 2, No. 1, Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016,

Artio Alkostar, "Korupsi Sebagai Extra Ordinari Crime", Makalah disampaikan dalam seminar *Training Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia*, Komisi Yudisaial Republik Indonesia, Santika Premiere Jogja, 18-21 November 2013.

Firdaus, "Kedudukan Hukum Internaional Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional Indonesia", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2014.

Tri Saputra, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam hayati dan Ekosistemnya di Wilayah Hukum Ditreskrimsus Polda Riau", *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* Volume III Nomor 2, 2016.

Atep Abdurofiq, "Politik Hukum Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 4 No. 2, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2016.

Fazzan, "Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal Islamiah Jurnal Futura* Vol. 14, No. 2, University Of Malaya, 2015

Arini Indika Arifin, "Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam", *Lex et Societas*, Vol.III, No. 1, 2015,

Wisnu Aryo Dewanto, "Status Hukum Internasional dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Mimbar Hukum*, Volume 21, Nomor 2, 2009

Mudzakkir, “Peneraan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan sistem Pemidanaan”, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2008.

C. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana.
Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Tentang Kekuasaan Kehakiman.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 545 K/Pid.sus/2013.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 81/ Pid.Sus/2011/PN.SBY.

E. Data Elektronik

A.A. Oka Mahendra, “*Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*”, terdapat dalam <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>.

Ade Fajar Rezki, “*Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Hukum Islam*”, Jurnal, 2017, dikutip dari <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/viewFile/17694/7511>.

- Endra Yuda, “Analisa Pasal 63 (2) dan 103 KUHP”, terdapat dalam <https://feelinbali.blogspot.com/2014/01/analisa-pasal-632-dan-103-kuhp.html>.
- Girindra Negara, “Apa yang dimaksud dengan Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia”, terdapat dalam <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tindak-pidana-dalam-hukum-pidana-indonesia/12364>.
- Indah Febriani Kaligis, “Daluwarsa Penuntutan Pidana di Tinjau dari Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).” Jurnal Lex Criemen Vol. VII. No. 1, 2018, Hlm.. 143”, terdapat dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/19425/18975>.
- S. M. Noor, ”Politik Hukum Dalam Praktek Ratifikasi Indonesia”, terdapat dalam http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZWM4ZWZhZjEzNzE3ODhmNzM0M2IzODM3YjFkZGE4ZWQ1NmEzMjczMA==.pdf.
- Wisnu Aryo Dewanto, “Akibat Hukum Peratifikasian Perjanjian Internasional di Indonesia: studi Kasus Konvensi Palermo 2000”, terdapat dalam <http://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/download/1416/1362>.